



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2014 – 2015
Masa Sidang	: II
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 10 Februari 2015
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 16.00 WIB s.d 20.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: membahas alokasi anggaran untuk unit organisasi, fungsi, dan program masing-masing Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015.
Ketua Rapat	: Ir. Yudi Widiananda Adia, MSi
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota	: dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Plt. Sekretaris Jenderal, Para Plt Direktur Jenderal dan Plt Kepala Badan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 16.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Plt. Sekretaris Jenderal, para Plt Direktur Jenderal dan Plt Kepala Badan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada hari ini adalah untuk membahas alokasi anggaran untuk unit organisasi, fungsi, dan program masing-masing Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Plt. Sekretaris Jenderal, para Plt Direktur Jenderal dan Plt Kepala Badan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI menyetujui program dan alokasi anggaran dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 untuk fungsi dan program masing-masing unit kerja Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut:

Dalam ribu rupiah

NO	UNIT KERJA ESELON I	RAPBN-P TA 2015	PAGU KEBUTUHAN	KEKURANGAN
1	Setjen (Program Dukungan Manajemen)	544.092.287	545.592.287	1.500.000
2	Ditjen Pembangunan Desa dan Pemberdayaan (Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)	2.708.520.001	6.676.250.001	3.967.730.000
3	Ditjen Pengembangan Kawasan Perdesaan (Program Pembangunan Kawasan Perdesaan)	660.000.000	2.733.970.000	2.073.970.000
4	Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu (Program Pengembangan Daerah Tertentu)	497.540.000	2.779.440.000	2.281.900.000
5	Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal (Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal)	827.842.000	2.485.342.000	1.657.500.000
6	Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Program Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi)	763.550.152	763.550.152	-
7	Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi)	664.370.691	1.131.580.691	467.210.000
8	Badan Litbang, Diklat dan Informasi (Program Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Informasi)	207.080.000	217.270.000	10.190.000
9	Inspektorat Jenderal (Program Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas)	55.000.000	55.000.000	-
	JUMLAH	6.927.995.131	17.387.995.131	10.460.000.000

2. Komisi V DPR RI meminta masing-masing unit kerja Eselon I (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Pembangunan Desa dan Pemberdayaan, Ditjen Pengembangan Kawasan Perdesaan, Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu, Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Badan Litbang, Diklat dan Informasi) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 mensinergikan antara program prioritas Pemerintah dengan usulan anggota Komisi V DPR RI pada daerah provinsi/kabupaten/kota yang sangat membutuhkan.
3. Masing-masing unit kerja Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sepakat dengan Komisi V DPR RI untuk melakukan penyempurnaan struktur pola penyajian dan menyerahkan daftar dari Desa Tertinggal/Sangat Tertinggal, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu, dan Kawasan Transmigrasi sebelum Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015.

4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melakukan simulasi mengenai perekrutan tenaga fasilitator/pendamping desa dengan memprioritaskan penggunaan sumber daya manusia desa/kecamatan setempat.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 20.00 WIB.

Jakarta, 10 Februari 2015

**PLT. SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI,**

TTD

H.M. NURDIN

KETUA RAPAT,

TTD

YUDI WIDIANA ADIA